BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja Indonesia adalah sesuatu faktor yang menjadi pendorong yang menjadi pertumbuhan ekonomi di suatu Negara, pada zaman era globalisasi seperti sekarang ini adanya faktor pengasilan yang lebih tinggi maka tentu menjadi faktor pemicu yang mana tertuju pada keuangan dan manajemen dalam rumah tangga, dengannya perbuatan tindak pidana secara orang perorangan menetapkan warga negara indonesia untuk berkerja diluar negeri, perbuatan tersebut di atur dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang penetapan dan perlindungan tenaga kerja indonesia diluar negeri. Bahwa tenaga kerja indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara indonesia yang memenuhi syarat untuk berkerja di luar negri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa pelaksanaan penetapan TKI swasta yang akan menempatkan TKI keluar negeri harus terlebih dahulu membuat perjanjian kerja sama menempatkan yang dibuat secara tertulis dengan mitra usaha atau pengguna yang membuat hak dan adanya jaminan kepastian yang akan dilakukan oleh pelaksanaan penempatan TKI dengan mitra usaha atau pengguna jasah TKI diluar negeri.

Tenaga kerja indonesia (TKI) yang digolongkan sebagai tindak pidana yang mana dilakukan terdakwa, apabila tidak mengikuti segala perintah yang di tetapkan maka akibat hukum yang berbentuk hukuman pidana berdasarkan

perbuatan terdakwa, berupa pidana penjara maupun pidana denda, hal ini yang dimaksud berdasarkan pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Bedasarkan ketentuan diatas maka dapat di ketahui baik pada keterangan pasal 102 ayat (1) huruf a dan pasal 4 yang memiliki unsur delik dengan perbuatan yang sama, artinya bahwa jenis perbuatan yang untuk menjamin keberlangsungan sistim hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang takut pada pihak lain oleh sebab itu penguasa wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan perundang-undang.

Tabel.1

Putusan Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan	Amar Putusan	Ket.
1	Nomor : 50/Pid.Sus/2017	Godstar Mozez Banik Alias Od	Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Godstar Mozes Banik alias OD terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan tindak pidana secara orang perseorangan menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri,” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan tunggal 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Godstar Mozes Banik alias OD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahanan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan; 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Godstar Mozez Banik Alias Od telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta selaku orang perseorangan menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri” 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 	
2	NOMOR : 116/PID/2017/PT KPG	Godstar Mozez	Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Godstar Mozes Banik alias OD terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan tindak 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan 	

		Banik Alias Od	39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	pidana secara orang perseorangan menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri,” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan tunggal 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Godstar Mozes Banik alias OD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahanan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;	Jaksa Penuntut Umum 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 50 / Pid. Sus / 2017 / PN Kpg, tanggal 16 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut	
3	Nomor : 2422 K/PID.SUS/207	Godstar Mozez Banik Alias Od	Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Godstar Mozes Banik alias OD terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan tindak pidana secara orang perseorangan menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri,” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan tunggal 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Godstar Mozes Banik alias OD dengan pidana penjara	MENGADILI 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Godstar Mozez Banik alias OD tersebut 2. Memperbaiki putusan pengadilan tinggi kupang nomor :116 / pid / 2017 / PT KPG tanggal 23 agustus 2017 yang menguatkan putusan pengadilan negeri kupang nomor: 50 / pid. sus/2017/pn.kpg tanggal 16	Inkracht

				<p>selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahanan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;</p>	<p>juni 2017 mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara dan pidana denda sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyatakan Terdakwa Godstar Mozez Banik alias OD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta selaku perseorangan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari 	
4	Nomor : 98/Pid.Sus/2015/ PN.MTR	Terdakwa I Suriyono Alias Yon	Ke Satu Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang	1. Menyatakan para terdakwa (terdakwa I Suriyono Als. Yon, terdakwa II Sirtupilaily Als. Ibu Eli dan terdakwa III Anis Als. Ibu Anis) terbukti	M E N G A D I L I 1. Menyatakan Surat Dakwaan dan penuntutan	

		<p>Terdakwa II Sirtupilaily Alias Ibu Eli Terdakwa III Anis Alias Ibu Anis</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Ke Dua Pasal 103 ayat (I) huruf f, g dan jo pasal 51 huruf d, g, h, I dan j jo pasal 68 ayat 1 undang –undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>secaralah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menempatkan Calon TKI / TKI yang tidak memiliki dokumen (sertifikat kompetensi kerja, visa kerja, perjanjian penempatan kerja, perjanjian kerja dan KTKLN) dan tanpa perlindungan asuransi “ sebagaimana dakwaan alternatif yang kedua baik untuk terdakwa I dan II maupun yang khusus untuk terdakwa III ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa (terdakwa I Suriyono Als. Yon, terdakwa II Sirtupilaily Als. Ibu Eli dan terdakwa III Anis Als. Ibu Anis) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi air 2 (dua) bulan kurungan ;</p>	<p>Penuntut Umum tidak dapat diterima;</p> <p>2. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;</p>	
5	Nomor : 48/PID/2015/PT. MTR	<p>Terdakwa I Suriono Alias Yon Terdakwa II Sirtupilaily Alias Ibu Eli Terdakwa III Anis Alias Ibu Anis</p>	<p>Ke Satu Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Ke Dua Pasal 103 ayat (I) huruf f, g dan jo pasal 51 huruf d, g, h, I dan j jo pasal 68 ayat 1</p>	<p>1. Menyatakan para terdakwa (terdakwa I Suriyono Als. Yon, terdakwa II Sirtupilaily Als. Ibu Eli dan terdakwa III Anis Als. Ibu Anis) terbukti secaralah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menempatkan Calon TKI / TKI yang tidak memiliki dokumen (sertifikat kompetensi kerja, visa kerja, perjanjian penempatan kerja, perjanjian kerja dan KTKLN) dan tanpa perlindungan asuransi “ sebagaimana dakwaan alternatif yang kedua baik untuk terdakwa I dan II maupun yang khusus untuk terdakwa III ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menerima permohonan banding dari jaksa penuntut umum tersebut</p> <p>2. Menguatkan putusan pengadilan negeri mataram tanggal 6 juli 2015 nomor 98/pid.sus/2015/pn.mtr, yang di mohonkan banding tersebut</p> <p>3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara</p>	

			undang –undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	(terdakwa I Suriyono Als.Yon, terdakwa II Sirtupilaily Als. Ibu Eli dan terdakwa III Anis Als. Ibu Anis)dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam)bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota danDenda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua)bulan kurungan ;		
6	Nomor : 284 K/PID.SUS/2016	Terdakwa I Suriono Alias Yon Terdakwa II Sirtupilaily Alias Ibu Eli Terdakwa III Anis Alias Ibu Anis	Ke Satu Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Ke Dua Pasal 103 ayat (I) huruf f, g dan jo pasal 51 huruf d, g, h, I dan j jo pasal 68 ayat 1 undang –undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1. Menyatakan para terdakwa (terdakwa I Suriyono Als. Yon, terdakwa II Sirtupilaily Als. Ibu Eli dan terdakwa III Anis Als. Ibu Anis) terbukti secaralah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menempatkan Calon TKI / TKI yang tidak memiliki dokumen (sertifikat kompetensi kerja, visa kerja, perjanjian penempatan kerja, perjanjian kerja dan KTKLN) dantapa perlindungan asuransi “ sebagaimana dakwaan alternatif yang kedua baik untuk terdakwa I dan II maupun yang khusus untuk terdakwaIII ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa (terdakwa I Suriyono Als.Yon, terdakwa II Sirtupilaily Als. Ibu Eli dan terdakwa III Anis Als. Ibu Anis) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota danDenda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua)bulan kurungan ;	M E N G A D I L I	Inkrach t
					1. Menolak Permohonan Kasasi Dari Pemohon Pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut 2. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara	

7	Nomor ; : 68/Pid.Sus/2014/ PN.Mtr	H. IZHAR HAMDI als H. IZHAR als. H.AZHAR	KeSatu Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri Kedua Pasal 103 ayat (I) huruf f dan jo pasal 51 huruf d, g, h, I dan j jo pasal 68 ayat 1 undang –undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Negeri	1. Menyatakan terdakwa H. Izhar Hamdi alias H. Izhar alias H. Azhar bersalah telah menempatkan calon TKI /TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i, dan j jo pasal 68 ayat (1) UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Izhar Hamdi alias H. Izhar alias H. Azhar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3.	MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa H. izhar hamdi als H. Izhar als. H. Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dalam dakwaan primer “ 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut; 3. Menyatakan terdakwa H. Izhar Hamdi als H. Izhar als. H. Azhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan asuransi” 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;	
8	Nomor : 73/Pid/2014/PT. MTR	H. IZHAR HAMDI als H. IZHAR als. H.AZHAR	Kesatu Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor	1. Menyatakan terdakwa H. Izhar Hamdi alias H. Izhar alias H. Azhar bersalah telah menempatkan calon TKI /TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 103 ayat (1)	MENGADILI 1. Menerima permintaan banding dari terdakwa 2. menguatkan putusan pengadilan negeri mataram	

			<p>39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri</p> <p>Kedua Pasal 103 ayat (I) huruf f dan jo pasal 51 huruf d, g, h, I dan j jo pasal 68 ayat 1 undang –undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri</p>	<p>huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i, dan j jo pasal 68 ayat (1) UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Izhar Hamdi alias H. Izhar alias H. Azhar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p>	<p>nomor: 68/pid.sus /2014/pn mtr.tanggal 6 mei 2014 ang dimintakan banding tersebut</p> <p>3. Memerintakan supaya terdakwa H .Izhar Als Izhar Als H Azhar, tetap berada dalam tahanan</p>	
9	Nomor : 533 K/Pid.Sus/2015	H. IZHAR HAMDI als H. IZHAR als. H.AZHAR	<p>Kesatu Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri</p> <p>Kedua Pasal 103 ayat (I) huruf f dan jo pasal 51 huruf d, g, h, I dan j jo pasal 68 ayat 1 undang –undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa H. Izhar hamdi alias H. Izhar alias H. Azhar bersalah telah menempatkan calon TKI /TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i, dan j jo pasal 68 ayat (1) UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Izhar Hamdi alias H. Izhar alias H. Azhar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi /terdakwa H. Izhar Hamdi alias Izhar alias H. Azhar tersebut</p> <p>2. Membebaskan kepada pemohon kasasi / terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	Inkrach t

			Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Negeri			
10	Nomor : 278/Pid.Sus/2017/ PN Sbr	Sukima	Kesatu Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang Kedua Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa SUKIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Perdagangan Orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SUKIMA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta)subsider 3 (tiga) bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). 	MENGADILI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Sukima tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta secaraOrang Perseorangan Menempatkan Warga Negara Indonesia untuk Bekerjadi Luar Negeri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
11	Nomor : 375/PID.SUS/2017/PT. BDG	Sukima	Kesatu Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang Kedua Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa SUKIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Perdagangan Orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SUKIMA dengan pidana penjara selama 7 	MENGADILI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Permintaan banding dari penuntut umum 2. Memperkuat putusan pengadilan negeri sumber tanggal 30 november 2017 Nomor 278/Pid.Sus/2017/P

			Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	(tujuh) tahun dan denda Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) subsidi 3 (tiga) bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan	N Sbr., ang dimintakan banding tersebut	
12	Nomor : 717 K/PID.SUS/2018	Sukima	Kesatu Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang Kedua Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa SUKIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Perdagangan Orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang di akwakan dalam surat dakwaan 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SUKIMA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) subsidi 3 (tiga) bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan	MENGADILI 1. Menolak Permohonan Kasasi dari pemohon kasasi /penuntut umum pada Kejaksaan negeri kabupaten Cirebon tersebut 2. Memperbaiki putusan pengadilan tinggi jawa barat di bandung nomor : 375/Pid.sus/2017/PT.BDG. , tanggal 15 januari 2018 yang menguatkan putusan pengadilan negeri sum bernomor :278/pid.sus/2017/pn.sbr., tanggal 30 november 2017harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000,00 (	Inkrach t

					seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung!

Berdasarkan Tabel 1. Data tentang Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri, maka dapat dilihat bahwa terdapat penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melihat Deskripsi motif, modus dan akibat hukum tindak pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri, dengan putusan pada Tabel 1., maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul yaitu **“Deskripsi Motif, Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri?
- b. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri?
- c. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri terhadap pelaku dan korban?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri

- 2) Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri
- 3) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan korban dari tindak pidana penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri.

b. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penilitian ini adalah:

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui alasan Motif, Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri.

2) Kegunaan Praktis

(a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.

(b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan tindak pidana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

(c) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul, **Deskripsi Motif, Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui website (internet) dan perpustakaan universitas, penulis menemukan beberapa peneliti terdahulu yang mirip dengan peneliti sedang tulis adalah sebagai berikut:

a. Nama : Indahwat seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana kupang.

1) Judul : Deskripsi tentang faktor penyebab pengiriman TKI secara ilegal keluar negeri dari wilayah pulau limor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penerapan dan perlindungan TKI diluar negeri?

2) Rumusan Masalah : Mengingat ruang yang berhubungan aspek yang berkaitan dengan status ilegal seorang tenaga kerja indonesia membuat penulis harus membatasi persoalan yang mau di teliti, untuk penelitian ini masalah yang akan teliti di battasi pada faktor penyebab pengirimwn tenaga kerja indonesia asal wilayah daratan pulau timur secara ilegal keluar negeri yang akan di tinjau berdasarkan Undang-

undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia?

b. Nama : Mikael Bhoka seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wancana kupang

1) Judul : deskripsi proses penyidikan terhadap perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (PJTKI) yang bermasalah berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja di luar negeri di wilaya kota kupang ?

2) Rumusan Masalah : Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang akan di teliti maka penelitian ini di batasi pada faktor yang menghambat proses penyidikan pada PJTKI yang bermasalah?

c. Nama : Amelian N. Kanahau seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wancana kupang

1) Judul : Deskripsi tentang pembatalan putusan pengadilan negeri oleh pengadilan tinggi tindak pidana pengiriman TKI ilegal ke luar negeri di wilayah hukum pengadilan negeri kelas Ia kupang?

2) Rumusan Masalah : berdasarkan penentuan masalah dalam penelitian ini, maka penulis terbatas dengan waktu, biaya dan tenaga yang tersedia hingga penelitian ini dibatasi pada penyebab putusan pidana terhadap pelaku pengiriman TKI ilegal oleh pengadilan negeri kelas Ia kupang di batalkan oleh pengadilan tinggi kupang?

d. Nama : Yaner H. penna seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wancana kupang.

- 1) Judul : Deskripsi tentang pengawasan terhadap perusahaan jasa tentang kerja Indonesia (PJTKI) tinjauan dari UU No Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri (suatu studi di kota kupang)
 - 2) Rumusan masalah : Mengingat keterbatasan waktu tenaga dan biaya yang penulis memiliki maka penelitian ini balasi pada upaya pengawasan terhadap PJTKI yang ada di kota kupang sebagai pelaksana penempatan TKI diluar dari kota kupang?
- e. Nama : Rensi P. Lolopayung seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wancana kupang
- 1) Judul : Deskripsi tentang pengiriman TKI yang tidak melalui uji kompetensi oleh perusahaan jasa tenaga kerja indonesia PJTKI suasta di kota kupang di tinju dari UU No Tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri?
 - 2) Rumusan Masalah : Mengingat akan keterbatasan waktu dan dari biaya dari penulis maka penelitian ini batasi pada faktor penyebab TJTKI pengeriman TKI yang tidak memiliki sertifikat uji kopentensi dan telah dikirimkan keluar negeri atau negara penerima?

Berdasarkan judul dan rumusan masalah di atas jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu penelitian ini merupakan karya penulis sendiri.

E. Metode penelitian

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptis adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan objek yang diteliti.

Berdasarkan arti sifat penelitian di atas maka yang hendak penulis deskripsikan disini adalah Motif, Modus Dan Akibat Hukum tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

b. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian hukum terdapat 3 jenis penelitian yaitu bahan hukum primer, Sekunder¹.

2. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 yaitu :

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah motif, modus dan akibat hukum tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm.12-13

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah putusan pengadilan terhadap motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

3. Sumber Data

Sumber data yang dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.²Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang tenaga kerja Indonesia
- 3) Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017
- 4) Putusan Nomor: 116/pid/2017/PT KPG
- 5) Putusan Nomor: 2422 K/PID.SUS/2017
- 6) Putusan Nomor: 98/PID.SUS/2015/PN.MTR
- 7) Putusan Nomor: 48/PID/2015/PT.MTR
- 8) Putusan Nomor: 284 K/PID.SUS/2016

²Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1 Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.175

- 9) Putusan Nomor:68/PID.SUS/2014/PN.MTR
- 10) Putusan Nomor:73/PID/2014/PT.MTR
- 11) Putusan Nomor:533 K/PID.SUS/2015
- 12) Putusan Nomor:278/PID.SUS/2017/PN SBR
- 13) Putusan Nomor:375/PID.SUS/2017/PT.BDG
- 14) Putusan Nomor:717 K/PID.SUS/2018

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi

³Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawaliipers. hlm.13

atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴

⁴ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 177